

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Aceh 2015-2024

Abdul Latif¹, Jean Elikal Marna ²

^{1,2} Universitas Negeri Padang, Indonesia

E-mail: abdullatifaja010@gmail.com¹, jeanelikal@fe.unp.ac.id²

Article History:

Received: 28 Oktober 2025

Revised: 10 Desember 2025

Accepted: 01 Januari 2026

Keywords: Local revenue, special allocation funds, village funds, poverty

Abstract: *Economic growth is the essential indicator that determining the progress and welfare of a nation, where one measure of progress is to assess the existing poverty rate. Aceh as the one of the provinces in Indonesia with the highest poverty rate, with a massive gap between urban and rural areas. In poverty alleviation, development is needed to stimulate the community to escape poverty and find employment. This study has intended to: (1) gauge the impact of local revenue on poverty in Aceh from 2015 to 2024. (2) To quantify the impact of the Special Allocation Fund on poverty in Aceh from 2015 to 2024. (3) To measure the impact of the Village Fund on poverty in Aceh from 2015 to 2024 and the impact of all independent variables used. This research is quantitative explanation using panel data with data collecting from BPS and Ministry of Finance. The output illustrate that local revenue and special allocation funds gave a negative and insignificant effect on poverty reduction in Aceh from 2015 to 2024. The village fund variable depicted a negative and significant relationship with poverty reduction in Aceh during the observation period (2015-2024).*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menentukan kemajuan dan kesejahteraan suatu negara, dimana negara dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang baik akan mendorong inovasi dan produktivitas yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Negara dengan produktivitas yang tinggi cenderung menghasilkan banyak barang dan jasa menjadi lebih efisien, dimana semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan, maka semakin tinggi manfaat yang didapat dari aktivitas ekonomi yang dilakukan (Lailisholawati, 2023). Untuk melihat tingkat kesejahteraan, maka salah satu faktor yang dapat diperhatikan adalah dengan melihat tingkat kualitas hidup rakyat yang tercermin pada tingkat kemiskinan yang ada (Mulia & Putri, 2022), dimana negara dengan banyak masyarakat miskin cenderung memiliki produktivitas yang rendah, hal ini juga menandakan mereka pada kondisi prasejahtera yang mengisyaratkan pada keadaan ekonomi yang tidak stabil, ketidakmampuan dalam mendapatkan pekerjaan, akses rendah terhadap informasi dan pendidikan, yang akhirnya bermuara pada rendahnya tingkat pendapatan (Fields, 2012).

Menurut BPS 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada persentase 8,57% atau 23,996,000,000 dari 281.603,8 juta penduduk. Besaran penduduk miskin ini mencerminkan banyak penduduk Indonesia yang terjebak dalam garis kemiskinan dan menjadi hambatan dalam melakukan pembangunan. Perlunya pembangunan yang menyeluruh untuk mengurangi angka kemiskinan merupakan modal awal bagi Indonesia untuk menciptakan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang baik, serta sinergi dari pemerintah melalui kementerian yang ada agar kemiskinan dapat diatasi (Kuntjorowati et al., 2024). Secara umum perubahan kemiskinan di Indonesia berjalan fluktuatif dan cenderung turun dari tahun ke tahun.

Data di atas menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan pada 10 tahun terakhir, dimana tingkat kemiskinan 2015 ke tahun 2019 mengalami penurunan konsisten dari 11,13% ke 9,22%, namun pada tahun 2020 angka kemiskinan kembali naik pada persentase 10,19%, angka ini meningkat sebesar 0,97% poin dari tahun sebelumnya di 2019. Tingkat kemiskinan yang kembali naik pada tahun 2020 juga disumbang oleh redupnya aktivitas perekonomian saat *pandemic covid-19* yang membuat aktivitas perekonomian melemah dan membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan. Pada tahun berikutnya angka kemiskinan kembali fluktuatif cenderung turun sejalan dengan pengstabilan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada (Anis Salsabila et al., 2024). Angka kemiskinan yang mencapai (8,57%) pada tahun 2024 tetap merupakan tantangan besar bagi Indonesia untuk menjadi negara maju, dengan total 38 provinsi yang ada, pemerintah harus berupaya mengatasi segala persoalan yang dapat memicu peningkatan kemiskinan agar sesuai dengan arah pengembangan ekonomi dan target ketercapaian pembangunan nasional (Erlando et al., 2020).

Secara khusus Kemiskinan di Indonesia disumbang oleh banyaknya penduduk miskin yang berada di pedesaan, dimana proporsi penduduk miskin di pedesaan hampir 2 kali lebih besar dari jumlah penduduk miskin yang berada di wilayah perkotaan. Angka ini memperlihatkan bahwa pemerintah perlu untuk memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan agar akumulasi kemiskinan umum dapat ditekan. Kebijakan berorientasi pada potensi desa akan mendorong perekonomian pedesaan sehingga menjadi sumber ekonomi baru yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang berujung pada pengentasan kemiskinan (Yi et al., 2024)

Berikut adalah data persentase kemiskinan kota desa di Indonesia tahun 2015-2024

Tabel 1. Persentase kemiskinan kota desa di Indonesia tahun 2015-2024

Kemiskinan Pada Provinsi Indonesia Dalam Persen			
Tahun	Kota	Desa	Nasional
2015	8,22	14,09, 5,87	11,96
2016	7,73	13,96, 6,23	10,70
2017	7,72	13,93, 6,21	10,12
2018	6,89	13,10, 12,60,	9,66
2019	6,56	6,04	9,22
2020	7,88	13,20, 4,65	10,19
2021	7,53	12,53,	9,71

		5	
2022	7,53	12,36, 4,83	9,57
2023	7,29	12,22, 4,93	9,36
2024	6,66	11,34, 4,68	8,57
<i>Sumber: BPS,2024</i>			

Data tersebut menggambarkan bahwa persoalan kemiskinan di Indonesia lebih banyak pada wilayah pedesaan, data pada tahun 2015-2024 memperlihatkan bahwa persentase kemiskinan di pedesaan hampir 2 kali lebih besar dari persentase kemiskinan yang berada di perkotaan. Tingkat disparitas kemiskinan periode tahun ini memperlihatkan disparitas 6,23 sampai 4,65 persen poin selama periode pengamatan, dengan disparitas tertinggi terjadi pada tahun 2016. Secara umum persentase kemiskinan pada 10 tahun terakhir tetap didominasi di wilayah pedesaan dengan rata-rata tingkat kemiskinan 12,97%.

Persoalan kemiskinan di setiap wilayah di Indonesia memiliki tantangan dan fenomena tersendiri, pada data dari tabel 2 yang telah disajikan, memang masyarakat yang berada di pedesaan merupakan penyumbang kemiskinan terbanyak, ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan daerah agar dapat memperhatikan kesejahteraan penduduk dari kebijakan yang diambil. Melalui kebijakan pengoptimalan potensi desa dan desentralisasi bantuan fiskal, diharapkan dapat memberdayakan setiap potensi yang ada, sehingga mendorong perekonomian masyarakat desa dan daerah (Harris & Posner, 2022)

Melihat perbedaan tingkat kemiskinan seluruh provinsi di Indonesia, perlu adanya sorotan khusus terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan untuk menilai efektivitas program yang diambil. Sajian BPS tentang tingkat kemiskinan dimasing-masing wilayah di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pada Regional Sumatera, Aceh merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di provinsi lain. Tingkat kemiskinan yang tinggi ini juga diiringi dengan tingginya tingkat disparitas kemiskinan antara kota dan desa.

Berikut adalah data persentase kemiskinan di Aceh tahun 2015-2024

Tabel 2. Persentase kemiskinan di Aceh 2015-2024

Kemiskinan Pada Provinsi Aceh Dalam Persen			
Tahun	Kota	Desa	Provinsi
2015	10,92	19,56	17,08
2016	10,79	18,80	16,73
2017	10,42	18,36	16,89
2018	9,63	18,52	15,97
2019	9,47	17,68	15,32
2020	10,31	17,96	15,43

2021	10,58	18,04	15,53
2022	10,35	17,06	14,74
2023	9,79	16,92	14,45
2024	8,37	14,99	12,64
<i>Sumber: BPS,2024</i>			

Rasio perbandingan kemiskinan desa dan kota di Aceh mellihatkan perbandingan yang besar. Dimana data di atas menerangkan perbedaan banyaknya masyarakat miskin di kota dan desa bahkan berkisar antara 6 sampai 8 %. Temuan ini mengidentifikasi bahwa ada permasalahan penduduk desa sehingga terjebak pada garis kemiskinan, hingga performa kebijakan pemerintah yang belum optimal dalam pembangunan. Tingkat kemiskinan yang tinggi di pedesaan ini juga mencerminkan adanya hambatan struktural dalam pembangunan desa yang perlu ditanggapi pemerintah pusat dan daerah melalui kebijakan yang diambil (Anam et al., 2023).

Temuan (Agustina et al., 2018) menunjukkan tingginya tingkat kemiskinan Aceh disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak bekerja, hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat Aceh yang bergantung pada sektor pertanian dan kurangnya ketersediaan akan lapangan pekerjaan. Tingginya kemiskinan Aceh juga diperparah oleh besarnya kemiskinan yang ada di desa, (Maifizar, 2016) menyebutkan adanya disparitas kemiskinan ini terjadi karena tingkat kemiskinan di desa yang tinggi disebabkan oleh (1) kegagalan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, pemerintah dinilai gagal dalam memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada, program pemberdayaan yang dilaksanakan hanya berfokus pada program yang sekali jalan tanpa adanya proses keberlanjutan, (2) akses yang tidak mudah pada sumber perekonomian, ketersediaan infrastruktur dasar dalam menyekong ekonomi rakyat dinilai gagal dalam penguatan ekonomi lokal, (3) adanya ketergantungan akan pemerintah, desa dinilai bergantung akan bantuan pembiayaan dari pemerintah provinsi, sehingga pembiayaan mandiri oleh desa belum bisa dilakukan tanpa adanya bantuan pemerintah. Penelitian oleh (Arida, 2022) juga menemukan perlunya pembangunan desa untuk menyediakan infrastruktur dasar dan penunjang merupakan kunci utama dalam pengentasan kemiskinan di desa. Infrastruktur pertanian dinilai sebagai hal yang krusial dalam menyokong perekonomian desa sehingga nilai jual petani meningkat yang didorong oleh kemudahan akses infrastruktur pertanian. Dalam pengentasan kemiskinan di desa, pembangunan merupakan kunci utama dalam menekan angka kemiskinan yang ada di desa. Dimana pembangunan terlaksana melalui pembiayaan daerah yang bersumber dari penggunaan anggaran Pendapatan Asli Daerah atau PAD. PAD merupakan anggaran pendapatan asli daerah yang bersumber pada pungutan daerah untuk pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya anggaran PAD yang mencukupi, daerah bisa melaksanakan program-program pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Hal ini juga disampaikan oleh (Royat, 2007) bahwa pemerintah melalui PAD dapat mengakselerasi pembangunan yang berujung pada peningkatan aktivitas ekonomi sehingga kemiskinan dapat diatasi.

Selain mengandalkan potensi yang ada di daerah, pemerintah pusat sebenarnya sudah berupaya untuk melakukan kebijakan pengentasan kemiskinan di setiap wilayah Indonesia, kebijakan otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan pasca reformasi. Kebijakan ini diberikan kepada pemerintah daerah

melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang membuka peluang bagi daerah untuk mengurus pembangunan daerahnya sendiri agar terciptanya pemenuhan layanan publik yang baik bagi daerah (Suriadi Hari, 2024). Wujud dari kebijakan otonomi ini adalah desentralisasi bantuan keuangan daerah melalui dana perimbangan. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan daerah melalui pos-pos pembangunan yang telah ditetapkan. Salah satu komponen dana perimbangan yang berorientasi pada pembangunan langsung daerah adalah Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus fisik daerah yang berorientasi pada pembiayaan infrastruktur dan layanan dasar. Dengan adanya dana alokasi khusus ini diharapkan dapat berpengaruh langsung terhadap pemecahan permasalahan di pedesaan dan mendorong pembangunan yang ada di desa. (Wahyuni et al., 2021) menegaskan dengan adanya DAK Fisik akan menciptakan penguatan ekonomi lokal yang membuka lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat pada pengurangan angka kemiskinan.

Program pembangunan desa tidak berhenti pada dana alokasi fisik saja, pada tahun 2015 pemerintah juga telah membuat program penguatan desa melalui dana desa, program bantuan yang diatur pemerintah melalui anggaran pusat yang diperuntukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan setiap potensi yang ada pada desa, program ini diharapkan mampu menjadi langkah awal bagi desa untuk bertransformasi dan masyarakat desa sehingga dapat mengatasi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian. (Septriani, 2023) mengutarakan dengan adanya dana desa masyarakat akan terbantu dalam pengelolaan potensi alam sehingga kegiatan ekonomi yang muncul dapat dipergunakan masyarakat sehari-hari dalam menopang pembangunan yang berkelanjutan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini menggabungkan tiga variabel utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa, untuk menganalisis pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2020-2024. Kombinasi ketiga variabel tersebut masih jarang diteliti, khususnya pada penggunaan dana alokasi khusus fisik terhadap penyediaan layanan dan infrastruktur dasar pada desa. Penggunaan variabel dana desa dan dana alokasi khusus fisik juga dianggap krusial dengan melihat efektivitas anggaran yang dikeluarkan pada masing-masing desa di kabupaten/kota melalui pos-pos yang ditetapkan, penggunaan variabel ini dianggap berhubungan dan dapat menafsirkan pengaruh yang ditimbulkan terhadap tingkat kemiskinan.

Kedua, analisis penelitian dilakukan pada Provinsi Aceh, provinsi yang termasuk pada tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia dengan disparitas proporsi kemiskinan desa dan kota yang sangat berbeda, penelitian pada daerah seperti ini tergolong jarang diteliti untuk proporsi tingkat kemiskinan yang sangat berbeda antara kota dan desa. Kemudian pada rentang tahun yang digunakan, peneliti mengambil data tahun 2020-2024 dimana setiap program yang dijalankan pemerintah untuk memajukan perekonomian, dapat dilihat pada masa pra dan post covid-19, dimana perekonomian mengalami kontraksi dan relaksasi. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam analisis data, sehingga diharapkan mampu menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan mendalam. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan di desa, kota dan pusat pada pemanfaatan pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus fisik dan dana desa untuk mengatasi kemiskinan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang dapat diterapkan untuk melihat efektivitas kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan daerah melalui otonomi daerah (DAK Fisik, Dana Desa) dan pengoptimalan anggaran daerah melalui PAD. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Rasio perbandingan kemiskinan desa dan kota di Aceh melihatkan perbandingan yang besar

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatori berbasis data panel dengan pendekatan asosiatif kausal, dimana peneliti mencoba menjelaskan dan menggambarkan semua fenomena yang ditemukan, kemudian manampilkan pengaruh dari variabel independen terhadap permasalahan yang diangkat. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 sampai tahun 2024 pada Provinsi Aceh untuk mengukur tingkat kemiskinan melalui variabel PAD, DAK Fisik dan Dana Desa. Analisis data penelitian menggunakan regresi data panel, dimana data diperoleh dari penggabungan data *time series* dan *cross-section* sehingga menghasilkan data panel yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dan Dana Desa terhadap kemiskinan di Aceh pada tahun 2015-2024.

Model estimasi awal dilakukan melalui regresi penentuan model melalui Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Langrange Multiplier untuk menentukan model hasil FEM, REM atasu CEM. Kemudian regresi dilanjutkan dengan Uji Asumsi Klasik Dan Diagnostik Model melalui Uji Multikolineritas dan Uji Heteroskedastisitas untuk menentukan kelinearan dan varian normal data. Uji terakhir peneliti lakukan untuk menguji hipotesis awal melalui uji t, uji f dan R² dalam melihat pengaruh yang ditimbulkan dari semua variabel terhadap kemiskinan Aceh pada periode pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Peneliti juga melakukan Uji Asumsi Klasik dan Diagnostik model melalui Uji Multikolineritas dan heteroskedastisitas. Pada Uji Multikolineritas, Hasil uji menunjukan semua variabel tidak berkaitan satu sama lain, dimana nilai korelasi antar variabel kecil dari 0,85. Kemudian pada Uji Heteroskedastisitas, hasil menunjukan varian error yang normal dimana nilai probabilitas dari seluruh variabel menunjukan hasil yang besar dari 0,05

Pengujian akhir kembali dilakukan untuk menguji hipotesis yang dibangun, uji ini dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dilihat dari nilai probabilitas pada regresi. *P-value* yang menunjukan hasil kecil dari 0,05 maka variabel bebas dikategorikan mempunyai pengaruh signifikan secara individu terhadap variabel terikat.

Tabel 3. Hasil Uji T

Variabel	Coefficient	Probabilitas	α	Kesimpulan
C	60652.97	0.0000	0.05	Signifikan
PAD	-1.23E-09	0.9039	0.05	Tidak Signifikan
DAK Fisik	-3.57E-06	0.3096	0.05	Tidak Signifikan
Dana Desa	-2.03E-05	0.0025	0.05	Signifikan
Sumber: Hasil Olah Data 2025				

Keterangan:

1. Variabel PAD memiliki probabilitas 0.9039 dengan koefisien -1.23E-09, yang artinya PAD memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2015-2024
2. Variabel DAK fisik memiliki probabilitas 0.3096 dengan nilai koefisien -3.57E-06, yang artinya DAK Fisik memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2015-2024
3. Variabel dana desa memiliki probabilitas 0.0025 dengan nilai koefisien -2.03E-05, yang artinya dana desa memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2020-2024

Dalam mengetahui pengaruh seluruh variabel independen memengaruhi variabel dependen secara simultan. Uji F dilakukan dalam melihat nilai probabilitas yang ada pada hasil uji, jika nilai probabilitasnya kecil dari 0,05 maka variabel independen terbukti berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji F

Probabilitas F statistik	α	Kesimpulan
0.0000	0,05	Signifikan
Sumber: Hasil Olah Data 2025		

Estimas model FEM menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada hasil uji f menunjukkan angka 0.0000. Nilai ini kecil dari 0.05 yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memengaruhi kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh secara simultan.

Pengujian R² dilakukan untuk menghitung seberapa banyak variasi dari semua variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Variasi ini dapat dilihat dari nilai *R-square* dari hasil regresi yang menginterpretasikan jika nilai semakin tinggi maka semakin baik variasi semua variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen. Hal yang sama juga berlaku jika nilai *R-square* yang ada lebih rendah, maka semakin lemah semua variasi variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji R²

R-Squared	Kesimpulan
0.993237	Variabel independen mampu menjelaskan pengaruh lebih banyak pada variabel dependen
Sumber: Hasil Olah Data 2025	

Analisis yang ditampilkan pada data diatas menunjukkan hasil *R-Square* 0.993237, yang menandakan seluruh variabel independen dapat menjelaskan 99.32% variasi terhadap variabel dependen. Sementara itu, sebesar 0.68% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar cakupan penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan

Hasil uji parsial yang peneliti lakukan menunjukkan nilai koefisien $-1.23E-09$ dengan probabilitas 0.9039, dimana nilai probabilitas ini lebih besar dari 0.05. Hasil uji yang lebih besar ini mengindikasikan PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Aceh pada tahun 2015-2024. Tidak signifikansinya hasil uji ini juga menandakan bahwa penyaluran PAD tidak serta-merta ditujukan pada program-program yang menyasar kelompok miskin. Hal ini juga didukung oleh temuan (Nurrisqi et al., 2023) yang menyatakan perlunya efisiensi dalam penyaluran PAD agar menyasar kelompok miskin di daerah sehingga program yang dilaksanakan dapat mengentaskan kemiskinan. Lebih lanjut hasil penelitiannya menemukan sistem pajak membuat masyarakat menjadi miskin, hal ini juga menimbang bahwa PAD terdiri dari beberapa pungutan pajak (pajak daerah dan retribusi daerah) yang menyasar seluruh masyarakat, sehingga perlu adanya penyesuaian agar pengumpulan dana melalui PAD tidak memberatkan masyarakat yang rentan akan kemiskinan. Disisi lain efisiensi pengalokasian program diharapkan mampu bekerja dalam sasaran pengentasan kemiskinan melalui pembangunan.

Dari sisi tenaga kerja penelitian yang ditemukan oleh (Marbun & Muchtolifah, 2023) mengemukakan penggunaan PAD pada program pembangunan sering tidak sejalan dengan terserapnya tenaga kerja lokal, hal ini dikemukakan pada penelitiannya yang menguji pengaruh tenaga kerja dan PAD dalam pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngwi. Dalam proses pembangunan penggunaan tenaga kerja lokal perlu digalakan agar program pembangunan dapat menyerap tenaga kerja yang membutuhkan, sehingga masalah keterbatasan akan pekerjaan dapat diatasi. (Wibowo Putro et al., 2022) juga menyimpulkan tidak signifikannya pengaruh PAD pada kemiskinan juga disebabkan kurangnya langkah strategis pemerintah dalam mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan, PAD harusnya menyasar ranah pendidikan sebagai wujud berkelanjutan dalam mengatasi pola pikir masyarakat. Penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pendidikan masyarakat dalam mengakses pendidikan terjangkau harus terus diperbarui. Kemudian penelitiannya juga menekankan perlunya akses kesehatan pada tempat terpencil dalam menjaga kesehatan masyarakat. (Apriana & Suryanto, 2010) mengemukakan adanya hubungan positif antara PAD dan kemiskinan dikarenakan penyaluran program pembangunan melalui skema pembangunan yang dibiayai PAD tidak diikuti oleh naiknya daya beli masyarakat, sehingga pengentasan kemiskinan tidak terjadi secara cepat. Hasil ini membuktikan PAD akan berkolerasi negatif jika pengumpulan PAD berpegang pada prinsip keadilan, menyertai tenaga kerja lokal dalam pemanfaatan dalam pembangunan, menyasar sektor primer (kesehatan, dan pendidikan) serta mendorong menaikkan daya beli masyarakat.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik Terhadap Kemiskinan

Pada uji t, uji persial pada variabel Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) menunjukkan nilai koefisien $-3.57E-06$ dengan probabilitas 0.3096, probabilitas dari uji ini besar dari 0,05 sehingga menyatakan dana alokasi khusus fisik tidak berpengaruh pada penurunan kemiskinan di

Aceh pada priode pengamatan. Temuan ini juga sejalan dengan temuan (Gatot Awaludin et al., 2023) yang mengatakan DAK Fisik tidak berpengaruh pada kemiskinan dan PDRB daerah tertinggal. Hasil uji yang tidak signifikan ini dikarenakan DAK Fisik adalah dana bantuan pembangunan yang bersifat *specific grant purpose* dimana pos-pos pembangunan telah diatur pemerintah pusat. Hal ini menjadi kendala ketika masalah kemiskinan di desa tidak bertemu dengan sasaran yang telah diatur dalam pembiayaan DAK Fisik sehingga program tidak tepat sasaran dalam menysasar kelompok miskin. Faktor penghambat lain adalah 3 tahun periode pengamatan adalah masa covid 19, dimana program yang direncanakan menjadi terhambat dan belum terlaksana dengan baik, hal ini juga dimuat dalam penelitian (Gatot Awaludin et al., 2023) yang menyebutkan adanya keterlambatan Petunjuk Teknik (Juknis) dari kementrian dan perubahan alokasi DAK yang berdampak pada penyesuaian perencanaan, penganggaran dana pendukung hingga lelang yang cukup lama mengakibatkan DAK Fisik tidak optimal dalam pemenuhan layanan dasar sebagai wadah pengentasan kemiskinan. Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian (Dewi Admaja & Setia Hamid, 2024), tentang *Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY* yang menyatakan DAK Fisik ditolak karena adanya keterlambatan juknis dan juklak yang berujung pada kegagalan lelang, kemudian ia menegaskan perlunya pemahaman kepala bidang dalam pemahaman pengelolaan DAK Fisik, monitoring dan evaluasi pasca pembangunan untuk ketepatan sasaran yang dituju.

(Wahyuni et al., 2021) juga mengatakan pada analisisnya tentang *Analisis Dak Fisik Pada Masing-Masing Bidang* menemukan DAK Fisik bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan pertanian tidak terbukti menurunkan angka kemiskinan. Hal ini menjadi temuan penting, mengingat 4 sektor itu adalah fondasi layanan dasar yang ada di daerah dan menjangkau masyarakat banyak. Tidak berpengaruhnya pembiayaan pada bidang ini menjadi proporsi besar bagi pendanaan DAK Fisik secara general dalam menilai pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan disuatu daerah. Dengan demikian DAK Fisik akan teroptimal jika program pendanaan ini tetap sasaran dan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada di daerah, adanya ketepwaktuan pelaksanaan program yang bermuara pada waktu pelaksanaan program, perlunya pemahaman kepada bidang akan pengelolaan DAK Fisik, monitoring dan evaluasi kesesuaian dan implentasi pendanaan pada semua pembangunan DAK Fisik.

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Pada uji parsial, variabel Dana Desa menunjukan pengaruh yang bebeda dari variabel sebelumnya. Dana desa terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Aceh pada priode pengamatan. Hasil dari uji ini menunjukan probabilitas dari Dana Desa berada pada signifikansi $0.0025 < 0.05$ dengan koefsien $-2.03E-05$. Nilai probabilitas yang kecil ini menandakan Dana Desa terbukti menurunkan tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2015-2024. Publikasi oleh (Halulanga & Bachmid, 2024) mengatakan terlaksananya Dana Desa dalam tujuan pengentasan kemiskinan sejalan dengan kesesuaian prioritas pembangunan desa, dimana pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan tercapai melalui pembangunan infrastruktur desa. Lebih lanjut temuannya mengatakan melalui pembangunan desa, pemberdayaan sumber manusia dan pemanfaat sumber daya lokal tercapai hingga penggunaan bahan baku untuk keperluan pembangunan terlaksana yang berujung pada peningkatan circular economy desa.

(Sigit & Kosasih, 2020) menemukan dengan adanya bantuan keuangan oleh pemerintah pusat ke daerah melalui Dana Desa, mengakibatkan bertambahnya kapasitas fiskal daerah dalam

pembangunan. Dengan adanya penambahan ini arah pembangunan menjadi jelas yang berindikasi pada kuatnya kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang kesejahteraan, penggunaan dana desa terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, (Muslihah et al., 2019) mengatakan dengan adanya program Dana Desa, kesejahteraan desa terbukti meningkat, hal ini diakibatkan dengan adanya bantuan Dana Desa, penghematan dari pembiayaan swadaya masyarakat dapat terjadi, ini memungkinkan pembangunan tanpa mengeluarkan uang banyak dari masyarakat.

Infrastruktur yang terbangun akan mengstimulus potensi daerah untuk berkembang sehingga akses yang mudah akan infrastruktur dasar dapat meningkatkan pertumbuhan daerah dari pengoptimalan potensi daerah yang dibangun, hal ini juga berujung pada pengentasan kemiskinan di daerah pengamatan. (Smas et al., 2025) juga menyimpulkan dalam penelitiannya tentang *Overcome Extreme Poverty Through the Utilization of Village Funds: A Case Study in Indonesia* menemukan penggunaan Dana Desa berdampak pada kemiskinan melalui tiga hal; pertama Dana Desa dapat mengembangkan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi layak dan fasilitas kesehatan, kedua, Dana Desa dapat mengembangkan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan dan dukungan *microenterprise*, khususnya pada wanita. Ketiga, dana desa dapat meningkatkan pengembangan infrastruktur produktif yang dapat mendukung mobilitas dan akses terhadap pasar. Dengan demikian berpengaruh Dana Desa terhadap pengurangan kemiskinan ini terjadi melalui kesesuaian program pada sasaran pembangunan, terbentuknya kapasitas fiskal yang kuat yang mampu menopang arah pembangunan, terleasisasinya program pada kesejahteraan masyarakat dan terciptanya infrastruktur desa yang mempermudah mobilitas warga terhadap akses pasar.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, peneliti berasumsi pada pengujian alokasi anggaran yang digunakan pada pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus fisik dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan Aceh 2015-2024. Pengujian dari alokasi anggaran ini memberikan batasan tersendiri pada efektivitas program yang ditujukan pada sasaran-sasaran pengentasan kemiskinan Aceh tahun 2015-2024, sehingga perlu adanya ukuran keberhasilan yang dimasukkan dalam variabel baru untuk keberlanjutan penelitian selanjutnya. Ukuran efektivitas dari variabel baru ini akan mengukur keberhasilan program melalui indikator produktivitas, ketepatan sasaran dan akuntabilitas dari program sehingga pengaruh *rill* yang ditimbulkan dapat diketahui.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, E., Nur Syechalad, M., & Hamzah, A. (2018). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH. 4(2).
- Anam, C., Plaček, M., Valentinov, V., & Del Campo, C. (2023). Village funds and poverty reduction in Indonesia: new policy insight. *Discover Global Society*, 1(1). <https://doi.org/10.1007/s44282-023-00016-6>
- Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). ANALISIS HUBUNGAN ANTARA BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, KEMANDIRIAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH.
- Arida, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan Pedesaan Di Provinsi Aceh (Factors Affecting Rural Poverty in Aceh Province). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*,

- 7(2). www.jim.unsyiah.ac.id/JFP
- Dewi Admaja, P., & Setia Hamid, M. (2024b). Purwiyantini Dewi Admaja Muda Setia Hamid EVALUASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.xxx>
- Erlando, A., Riyanto, F. D., & Masakazu, S. (2020). Financial inclusion, economic growth, and poverty alleviation: evidence from eastern Indonesia. *Heliyon*, 6(10). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235>
- Fields, G. S. (2012). Challenges and policy lessons for the growth-employment-poverty nexus in developing countries. <http://www.izajolp.com/content/1/1/6>
- Gatot Awaludin, M., Wibowo, P., & Keuangan Negara STAN, P. (n.d.). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DAN PDRB DAERAH TERTINGGAL (Vol. 3, Issue 4).
- Halulunga, F., & Bachmid, G. (2024). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. 5, 5234.
- Harris, J. A., & Posner, D. N. (2022). Does decentralization encourage pro-poor targeting? Evidence from Kenya's constituencies development fund. *World Development*, 155. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105845>
- Kuntjorowati, E., Andari, S., Prayoga, R. A., Yusuf, H., Soegiharto, S., Fatimah, S., Listyawati, A., Yuniarti, L., Suryani, & Hakim, F. N. (2024). Effectiveness of strengthening social protection and security programs in alleviating poverty in rural areas through multi-sector partnerships. *Heliyon*, 10(23). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40485>
- Lailisholawati, L. (2023). ANALISIS DAYA SAING DAN INOVASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2016-2020. In *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* (Vol. 07, Issue 04).
- Maifizar, A. (2016). KARAKTERISTIK DAN FENOMENA KEMISKINAN KELUARGA MISKIN PEDESAAN DI ACEH.
- Marbun, S. N. K., & Muchtolifah. (2023). PENGARUH TENAGA KERJA DAN PAD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN NGAWI. 11(3). <https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p320>
- Muslihah, S., Octavana Siregar, H., Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Jl ProfDrMrDrs Notonegoro, D., & Akuntansi YKPN Jl Gagak Rimang, A. (2019a). DAMPAK ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 7(1), 85–93.
- Nurritzqi, A. F., Muchtar, M., & Sihombing, P. (n.d.). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2019.
- Royat, S. (n.d.). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Government Policy on Poverty Alleviation.
- Septriani, S. (2023b). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(3), 884–894. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1201>

-
- Sigit, A. T., & Kosasih, A. (2020). *INDONESIAN TREASURY REVIEW PENGARUH DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN: STUDI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA*.
- Smas, M. H., Mokay, M. M., Nurhayati, E., & Margana. (2025). Overcoming extreme poverty through the utilisation of Village Funds: A case study in Indonesia. *Societal Impacts*, 6, 100128. <https://doi.org/10.1016/j.socimp.2025.100128>
- Suriadi Hari, F. A. M. L. Y. I. L. (2024). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 18(Menara Ilmu), 1–10.
- Wahyuni, A. Y., Juanda, B., & Purnamadewi, Y. L. (2021b). Analisis Pengaruh Alokasi DAK Masing-Masing Bidang Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jwl.9.1.1-17>
- Wibowo Putro, P., Fahmi Fadhillah, G., Asna, N., & Alfiana, N. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG. *JURNAL EKOMBIS*, 8(2). <https://doi.org/10.35308/ekombis.v7i2>
- Yi, Y., Zhu, N., Zhao, Y., & Liu, C. (2024). How do capable village cadres influence the effectiveness of rural living environment improvement? Empirical evidence from China. *Heliyon*, 10(20). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38727>